

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Ridhonya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2016-2021 dapat kami selesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Renstra DISPARPORA 2016-2021 adalah merupakan Dokumen Perencanaan yang mengacu kepada Dokumen RPJMD. Dan merupakan dokumen acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam lima tahun kedepan. Dokumen ini adalah merupakan Dokumen Perubahan RENSTRA 2016-2021. Karena dokumen ini merupakan revisi dari dokumen RENSTRA 2016-2021 sebelumnya. Adapun revisi atau perbaikan terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Karena Disparpora Kab. Tanjung Barat telah melakukan perbaikan IKU yang telah diketahui dan disetujui oleh Bappeda kab. Tanjung Barat dan Biro Organisasi Prov. Jambi.

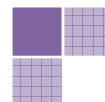
Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra 2016-2021 ini semoga membawa kebaikan pada OPD yang bersangkutan khususnya, dan juga kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya.

Kuala Tungkal, Mei 2019

Kepala Dinas  
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
DINAS PARAWISATA  
KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA  
  
OTO RIADI  
Nip. 19611013 198803 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b>	<b>iii</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	LATAR BELAKANG MASALAH	1
	LANDASAN HUKUM	2
	MAKSUD DAN TUJUAN	5
	SISTEMATIKA PENULISAN	6
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANANSKPD</b>	<b>8</b>
	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
	SUMBER DAYA OPD	17
	KINERJA PELAYANAN OPD	21
	TANTANGAN DAN PELUANG DISPARPORA	23
<b>BAB III</b>	<b>STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>28</b>
	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
	TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	28
	TELAAH TERHADAP RENSTRA PROVINSI DAN RENSTRA KEMENTERIAN	33
	TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN	
	HIDUP STRATEGIS	45
	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DISPARPORA	52
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>56</b>
	VISI DISPARPORA	56
	MISI DISPARPORA	56
	TUJUAN DAN SASARAN DISPARPORA	57
	STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISPARPORA	59
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK</b>	
	<b>SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>63</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN</b>	
	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>66</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>68</b>



## DAFTAR GAMBAR & TABEL

1)	GAMBAR	2.1	:	STRUKTUR ORGANISASI DISPARPORA KAB. TANJAB BARAT....	9
2)	TABEL	2.1	:	KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON.....	18
3)	TABEL	2.2	:	KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN....	19
4)	TABEL	2.3	:	ALOKASI ANGGARAN DISPARPORA.....	19
5)	TABEL	2.4	:	SARANA DAN PRASARANA.....	20
6)	TABEL	2.5	:	CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISPARPORA.....	22
7)	TABEL	2.6	:	TANTANGAN DAN PELUANG DISPARPORA.....	26
8)	TABEL	3.1	:	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	31
9)	TABEL	3.2	:	KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA SKPD TERHADAP SASARAN RENSTRA SKPD PROVINSI DAN SKPD.....	43
10)	TABEL	3.3	:	HASIL TELAHAH STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.....	48
11)	TABEL	3.4	:	ISU-ISU STRATEGIS DIPARPORA .....	53
12)	TABEL	3.5	:	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	54
13)	TABEL	4.1	:	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA.....	58
14)	TABEL	4.2	:	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD.....	61
15)	TABEL	5.1	:	PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	65a
16)	TABEL	6.1	:	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

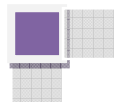
### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung.

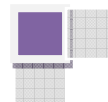
Renstra Disparpora Kab. Tanjab Barat ini merupakan Renstra perubahan yang mengacu pada Rancangan Awal (Perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Dengan mendasar



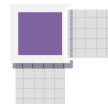
pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

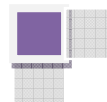
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Salolangun Bangko dan Daerah Tingkat II tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Siste, Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-unf=dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undnag-ungdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegelolaan Keuanagn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Perinth Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Rpublik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 24);

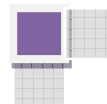


18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembara Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah untuk memberikan acuan resmi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun yang mengacu pada RPJMD periode 2016-2021.

Adapun tujuan disusunnya Renstra DISPARPORA Kab. Tanjab Barat adalah:





1. Mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi DISPARPORA sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjab Barat
2. Menjadi acuan bagi aparat DISPARPORA dalam penyusunan program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 tahun periode 2016-2021
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan DISPARPORA Kab. Tanjab Barat

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat disusun sebagai berikut:

➤ **BAB I : Pendahuluan**

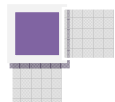
Terdiri dari Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan

➤ **BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

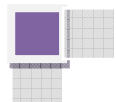
memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD;

➤ **BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaah terhadap Renstra Provinsi dan Renstra Kelembagaan/Kementerian K/L, telaah terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;



- **BAB IV : Tujuan dan Sasaran**  
terdiri atas uraian mengenai Tujuan dan sasaran jangka menengah serta Indikator Kinerja Sasaran mengacu pada RPJM
  
- **BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**  
memuat tentang Strategi-strategi serta Arah arah Kebijakan yang ditempuh dalam upaya mencapai tujuan;
  
- **BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  
memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
  
- **BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  
memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
  
- **BAB VIII : Penutup**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

### DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

### KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Disparpora Kabupaten Tanjung Jabug Barat memiliki Struktur Organisasi sebagaimana berikut:

##### 1. Kepala Dinas

##### 2. Sekretaris Dinas

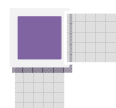
- a. Sub bag Umum dan Keuangan
- b. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

##### 3. Bidang Pariwisata

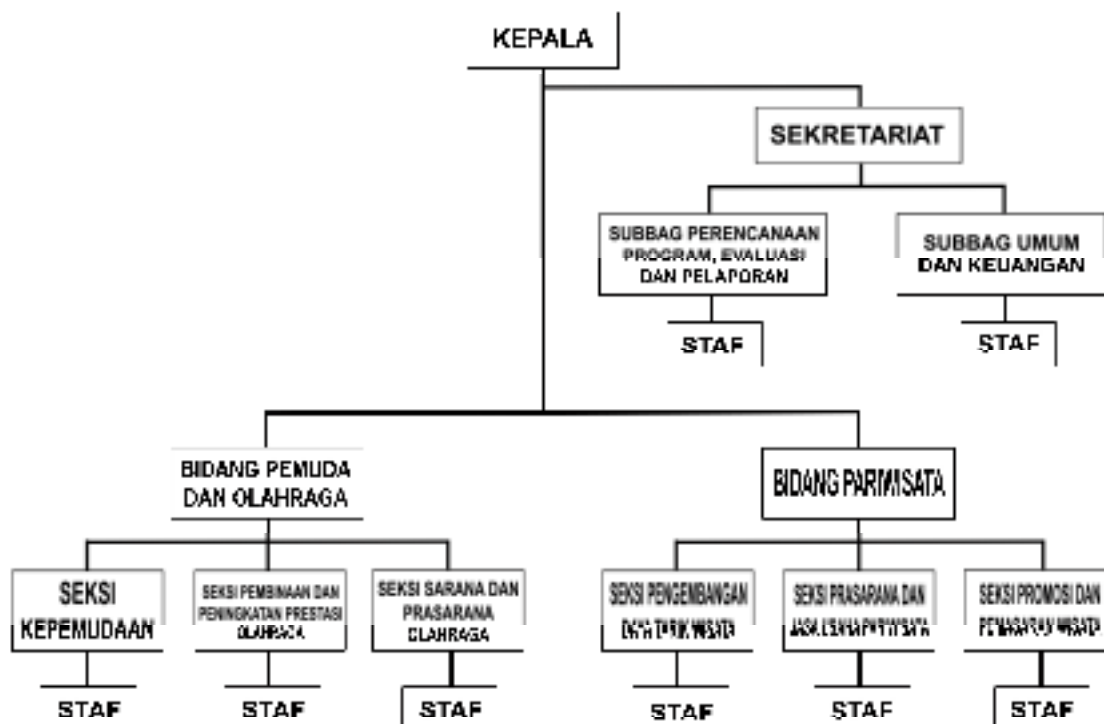
- a. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata
- b. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata
- c. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

##### 4. Bidang Pemuda Olahraga

- a. Seksi Kepemudaan
- b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
- c. Seksi Sarana dan Prasarana



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Disparpora  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



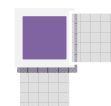
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

Disparpora memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Renstra dan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis;
- c. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk kelancaran tugas-tugas dinas;

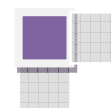


- d. Memimpin segala kegiatan dinas dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta atau tidak sehubungan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Menetapkan kebijakan dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Menyusun rencana pengembangan kegiatan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas lain dalam melaksanakan semua program dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Malaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- j. Melaksanakan tugas, dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;

## 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya terkait lingkup tugas;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



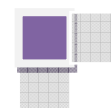
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;



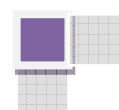
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

**2. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Program** mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya;

**3. Bidang Pemuda dan Olahraga**

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk



melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

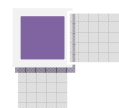
- a. Menyusun, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kepemudaan, profil perkembangan kepemudaan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :

1. Seksi Kepemudaan
2. Seksi Pembinaan dan Penigkatan Prestasi Olahraga
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

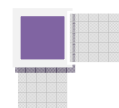
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

1. Seksi Kepemudaan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukaan penyusunan rencana dan anggaran seksi kepemudaan;
  - b. Melakukan penyiapan perumsan dan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;





- c. Melakukan pengumpulan data dan profil perkembangan kepemudaan;
  - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kegiatan kepemudaan;
  - e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan;
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - c. Melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
  - e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait tugasnya.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. Melakuakn penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kebutuhan, pemnafaatan sarana dan prasarana olahraga dan pertandingan olahraga;
  - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian sarana prasarana dan pertandingan olahraga;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seleksi sarana dan prasarana olahraga



- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

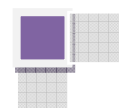
#### 4. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dibidang Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut , Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi peserta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pariwisata;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, kordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan, dan evaluasi pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
- d. Penyimpanan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi, pemantauan dan evaluasi promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

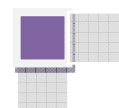
Bidang Pariwisata membawahi :

- 1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata
- 2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata
- 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata



Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pariwisata.

1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan pelestarian daya tarik wisata;
  - c. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyajikan data informasi pengembangan pelestarian daya tarik wisata;
  - d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan daya tarik wisata;
  - e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.
  
2. Seksi Prasarana dan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
  - c. Melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan jasa sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata;
  - d. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana serta jasa usaha pariwisata;
  - e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan sarana prasarana dan jasa usaha pariwisata; dan
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.



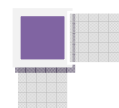
3. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata Mempunyai Fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kejadian anggaran seksi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran pariwisata;
  - c. Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menginformasikan data promosi dan pemasaran pariwisata melalui media, masyarakat dan wisatawan;
  - d. Melakukan Penyiapan Bahan penyelenggaraan dan kerja sama penyelenggaraan even serta partisipasi dalam pameran/event promosi dan pemasaran pariwisata;
  - e. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi promosi dan pemasaran pariwisata;
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Disparpora Kab. Tanjab Barat

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya Cerdas.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga memiliki pegawai (PNS) sejumlah 22 orang. Dengan porsi 16 orang berada di jajaran struktural dan 6 orang pegawai fungsional umum. Dengan memperbantukan tenaga Honorer atau Pegawai tidak tetap sebanyak 57 Orang. Melihat dari porsi itu jumlah ketersediaan SDM di Dinas PARPORA sangat jauh dari kata cukup. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga administrasi pada

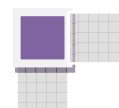


khususnya Dinas PARPORA mempekerjakan tenaga pegawai tidak tetap atau yang biasa disebut tenaga honorer dengan jumlah yang lumayan banyak. Tenaga honorer tersebut tidak hanya ditempatkan untuk membantu administrasi tapi juga sebagai tenaga lapangan seperti, penyanyi juga pemain musik.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

No	Jabatan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Staf TKK	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	2	-	-	-	2
4	Kassubag/Kasi	-	-	-	8	-	-	8
5	Staf Pelaksana	-	-	-	-	4	-	4
6	Honorer	-	-	-	-	-	53	53
	<b>Jumlah</b>	-	1	3	8	4	53	71



Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

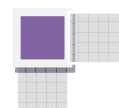
No	Jabatan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	1	1	-	-	-	-	3
4	Kassubag/Kasi	-	5	-	3	-	-	8
5	Staf Pelaksana	-	1	2	3	-	-	6
6	Honorar	-	7	1	44	-	-	53
<b>Jumlah</b>		2	16	3	53	-	-	71

### 2.2.2 Sumber Dana

Untuk menunjang kegiatan Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran yang cenderung meningkat dari tahun ketahun. Berikut adalah jumlah alokasi anggaran Disparpora dari Tahun 2011-2015.

Tabel 2.3  
Alokasi Anggaran Disparpora dari Tahun 2011-2015

No	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2011	3.516.682.115	3.336.675.969	94.88
2	2012	11.217.145.855	10.809.631.825	96.37



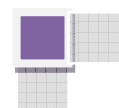
3	2013	17.410.251.325	15.665.132.192	89.98
4	2014	14.865.739.600	13.705.686.182	92.19
5	2015	6.084.633.200	5.843.650.087	96.04

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi tanah, bangunan, inventaris / peralatan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan pendukung lainnya. Sarana dan Prasarana Disparpora dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	1	
2	Bangunan	1	
3	Ruang Kantor	7	
4	Ruang Rapat	1	
5	Ruang Alat Musik	1	
6	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	
7	Kendaraan Dinas (Motor)	12	
8	Komputer	8	
9	Laptop	8	
10	Printer	12	
11	AC	9	
12	Telepon	1	
13	Meja Kerja	46	
14	Kursi Kerja	50	
15	Lemari Arsi	21	
16	Filling Kabinet	10	



17	UPS	4	
18	DII		

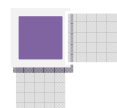
### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu Urusan Kepariwisataan, Urusan Pemuda dan Urusan Olahraga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Maka jenis pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Merumuskan kebijakan teknis bidang Kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga;
- (3) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga;
- (4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga;



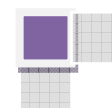


Capaian Kinerja Disparpora dapat dilihat pada tabel berikut:

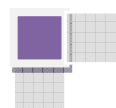
Tabel 2.5 (T-C.23)

Capaian Kinerja Pelayanan Disparpora Periode Renstra Sebelumnya

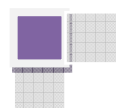
Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target IKK	Target RENSTRA Tahun Ke					Relaisasi RENSTRA Tahun ke					Rasio Tahun ke				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah even promosi pariwisata daerah	4	2	3	4	5	6	-	-	4	4	3	-	-	100	80	50
Jumlah kunjungan hotel	10 rb	5rb	10rb	15rb	20rb	25rb	-	-	-	10 rb	6578	-	-	-	50	24
Jumlah objek pariwisata	4	2	3	4	5	6	1	1	2	4	3	50	33	50	80	50
Jumlah hiburan Umum	2	1	2	3	4	5	-	-	2	2	2	-	-	67	50	40
Jumlah pembinaan, pendidikan dan pelatihan berbasis kepemudaan	4	2	3	4	5	6	4	4	5	4	1	200	133	125	80	17
Jumlah peserta Paskibraka	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	100	100	100	100	100
Jumlah peserta Napak Tilas	20	10	15	20	25	25	-	10	10	9	10	-	67	50	36	40
Jumlah Organisasi Pemuda	28	25	28	30	32	34	-	-	28	28	29	-	-	93	88	85
Jumlah penghargaan dan prestasi olahraga	30	20	30	40	50	60	-	-	-	30	209	-	-	-	60	348
Jumlah even olahraga di daerah	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	50	50	50	33	33
Jumlah pembinaan dan pendidikan bidang olahraga	5	4	4	5	6	6	4	5	4	4	2	100	125	80	67	33
Jumlah sarana dan prasarana olahraga	40	30	40	50	60	70	-	-	44	44	78	-	-	88	73	111



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Namun terlihat terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun tahun terakhir Renstra dimana realisasi tidak menunjukkan angka yang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal menyangkut kondisi keuangan daerah yang mengharuskan seluruh OPD se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Efisiensi anggaran dan pemangkasan kegiatan. Dari hasil pencapaian kinerja diatas, akan menjadi acuan dinas dalam pencapaian kinerja untuk tahun tahun berikutnya.



**TABEL T-C 24**



## 2.4 Tantangan dan Peluang Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat

Tantangan dan peluang dalam pengembangan Disparpora Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait pada tugas pokok dan fungsi Disparpora seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan menggunakan pola analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threat) berdasarkan pengamatan beberapa tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

### 1. Kekuatan (STRENGHT)

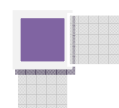
Ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Disparpora yang merupakan suatu modal utama bagi kelanjutan Disparpora yang lebih baik. Kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Posisi jajaran jabatan struktural di Disparpora yang terisi lengkap
- b) Jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan lulusan Perguruan Tinggi cukup banyak
- c) Banyaknya Jumlah Pemuda yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki skill serta keahlian baik di bidang kewirausahaan, keilmuan, dan di bidang olahraga
- d) Terdapatnya keragaman etnik, seni budaya daerah, Baik budaya lokal yang merupakan budaya leluhur maupun budaya budaya islami
- e) Keberadaan potensi potensi wisata alam dan pantai yang dimiliki daerah

### 2. Kelemahan (WEAKNESS)

Disamping Faktor Kekuatan (strenght) yang dimiliki, terdapat juga kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjab Barat. Kelemahan tersebut dapat dipetakan dari beberapa aspek antara lain:

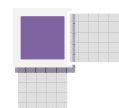
- a) Aspek Sumber Daya
  - Jumlah pegawai dalam jajaran fungsional umum (staf) yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan keberadaan pegawai yang



menduduki jabatan struktural, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengalokasian tugas

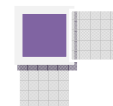
- Rekrutmen PNS yang diterima sering tidak sesuai dengan kemampuan dan klarifikasi ilmu yang dibutuhkan
- b) Aspek Pariwisata
  - Belum optimalnya dukungan alokasi dana dari daerah dalam upaya penggalian dan pengembangan potensi-potensi wisata yang ada
- c) Aspek Kepemudaan
  - Masih kurangnya dukungan kegiatan Disparpora Kab. Tanjab Barat yang berbasis kepemudaan
- d) Aspek Olahraga
  - Keterbatasan anggaran yang diberikan daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang olahraga

Dengan melihat pada faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat, maka dapat diidentifikasi Tantangan tantangan dan peluang peluang yang dimiliki oleh Disparpora Kab. Tanjab Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan dan peluang tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini:

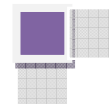


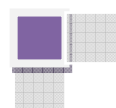
**Tabel 2.7**  
**Tantangan dan Peluang Disparpora Kab. Tanjab Barat**

ASPEK	TANTANGAN	PELUANG
Aspek Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih kurangnya jumlah SDM khususnya di jajaran Staf fungsional umum</li> <li>➤ Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.</li> <li>➤ Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi.</li> <li>➤ Belum optimalnya pengelolaan data base Disparpora yang tersusun secara sistematis dan akurat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dalam meningkatkan kinerja pegawai</li> <li>➤ Adanya bimtek, pelatihan dan sosialisai yang berguna bagi pengembangan aparatur</li> </ul>
Aspek Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata</li> <li>➤ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan serta menjaga dan memelihara tempat tempat wisata yang ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan</li> <li>➤ Letak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada pada segi tiga pertumbuhan ekonomi Batam,</li> </ul>



<p>Aspek Pemuda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya minat dan kesadaran pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan</li> <li>➤ Meningkatnya jumlah pemuda yang terlibat dalam jebakan NAPZA dan HIV/AIDS. Sementara di sisi lain hal tersebut kurang diikuti dengan upaya-upaya mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya NAPZA dan HIV/AIDS tersebut.</li> </ul>	<p>Malaysia dan Singapura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan</li> <li>➤ adanya KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) sebagai wadah berbasis kepemudaan</li> </ul>
<p>Aspek Olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya upaya pengembangan budaya olahraga, baik di kalangan pemuda maupun masyarakat luas.</li> <li>➤ Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional</li> <li>➤ Banyaknya bibit bibit daerah yang berbakat dan berpotensi</li> </ul>









## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat

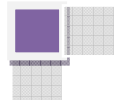
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang , dilaksanakan oleh DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- 1) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
- 2) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi
- 3) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sistematis dan akurat
- 4) Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata
- 5) Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga

#### 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

##### 3.2.1 Visi

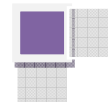
Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:



**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU,  
ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”**

Penjabaran dari Visi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang MAJU  
Merupakan daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat PDRB tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam, mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi kerakyatan
- 2) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ADIL  
Adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Meningkatkan anggaran daerah yang pro rakyat, terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan agraria yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
- 3) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang MAKMUR  
Makmur kehidupan warganya dan melimpah kekayaan wilayahnya. Ini dapat dilihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat
- 4) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang BERMARTABAT  
Suatu kondisi kehidupan manusia ideal, yakni lengkapnya penghargaan dan pemenuhan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat, kelengkapan itu ialah mampu mewujudkan cipta rasa dan karsanya secara nyata.
- 5) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang BERKUALITAS  
Tingkat baik buruknya atau taraf hidup atau derajat hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



### 3.2.2 Misi

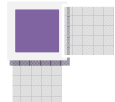
Dan berikut adalah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1. Peningkatan pelayanan umum (publik service) melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

### 3.2.3 Program

Berikut adalah program program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Misi tersebut diatas:

- Program dalam Pencapaian Misi Kesatu
  - Pembangunan jalan dan jembatan.
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
  - Lingkungan sehat perumahan
  - Sarana prasarana perhubungan
  - Pembinaan dan pengembangan tenaga listrik
- Program dalam Pencapaian Misi Kedua
  - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
  - Pengembangan destinasi wisata
- Program dalam Pencapaian Misi Ketiga
  - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan perikanan
  - Peningkatan kesejahteraan petani
  - Pengembangan Pemasaran pariwisata
  - Peningkatan penerapan teknologi /perkebunan



- Program dalam Pencapaian Misi Keempat
  - Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
  - Pengembangan nilai budaya
  - Pengembangan wawasan kebangsaan
  - Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
  - Peningkatan peningkatan peran serta kepemudaan
  - Pengelolaan keragaman budaya
  - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

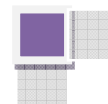
Tabel 3.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian  
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS</b>					
No.	Uraian Misi / Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
<b>I</b>	<b>Misi I: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN EKONOMI YANG BERKUALITAS / Tujuan 1:</b> Meningkatkan infrastrukturnya dasar yang berkualitas <b>Sasaran 1.4:</b> Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olahraga	<b>Program:</b> Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga	Kurangnya / Minimnya sarana dan prasana olahraga yang dapat memfasilitasi kegiatan olahraga untuk semua cabang olahraga	Kurangnya alokasi dana untuk mendukung kegiatan pembangunan prasarana olahraga	Terdapat 28 Cabor yang aktif dan berprestasi

2	<p><b>Misi III:</b>  <b>MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI DAN PERIKANAN</b>  <b>Tujuan 2:</b>  Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan  <b>Sasaran 3.8:</b>  Berkembangnya potensi wisata agar menjadi objek wisata yang dikenal luas masyarakat</p>	<p><b>Program:</b>  Pengembangan Pengembangan Destinasi Wisata</p>	<p>Status Kepemilikan Lahan untuk Potensi Wisata yang masih belum Milik Pemda</p> <p>Masih minimnya sarana dan prasarana pariwisata dalam menunjang pemasaran pariwisata</p>	<p>Kurangnya alokasi dana untuk pengembangan potensi wisata</p> <p>Kurangnya alokasi dana untuk pengembangan sapsas pariwisata</p>	<p>Banyaknya potensi-potensi wisata yang ada di daerah</p>
---	---	--	--	--	--

Bila melihat dari tabel diatas pada dasarnya OPD siap dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah dalam pencapaian pembangunan. Hanya terdapat beberapa hambatan yang mayoritas dikarenakan faktor kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Yang selanjutnya diharapkan daerah dapat memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam usaha OPD membantu mewujudkan visi dan misi daerah.



### **3.3 Telaah terhadap Renstra Provinsi dan Telaah Renstra Kememterian /Kelembagaan (K/L)**

#### **1. Telaah Renstra untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

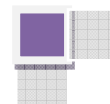
##### **1.a. Telaah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi**

Sasaran pembangunan yang berkenaan dengan kepemudaan dan keolahragaan pada Diskepora Provinsi Jambi adalah “Terwujudnya Pemuda yang Berkarakter, Berprestasi, Unggul dan Berdaya Saing”.

Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan Provinsi Jambi 2016-2021 pada misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender dan ke-4 yaitu Meningkatkan daya saing daerah melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis iptekin dan entrepreneurship dengan fokus pada bidang pembangunan kepemudaan yaitu peningkatan pembangunan kompetensi dan karakter pemuda dan prestasi olahraga dengan penetapan program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan melalui program antara lain:

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
2. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
3. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
4. Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya.
5. Program peningkatan sarana dan prasana olahraga dan pemuda.
6. Program kebijakan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.

##### **1.b. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia**

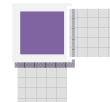


Dalam menyusun Renstra OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi harus berpedoman dan disinergikan dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI 2015 - 2019. Renstra Kemenpora RI disikapi dengan tujuan pembangunan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI 2015-2019 adalah Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan berupa memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi, meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi dan ASEAN Economic Community 2015, dan meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, serta Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga melalui meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga, meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi, meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan, dan meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.

Tujuan diatas merupakan hasrat dan keinginan yang hendak dicapai dari visi kemenpora 2015-2019 “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi yang merupakan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan Pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;

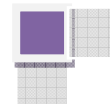




3. Meningkatkan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan;
4. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
5. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
6. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Untuk mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing dapat dilakukan melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kepanduan/kepramukaan sebagai wadah pengkaderan calon pemimpin bangsa.

Kemudian meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan



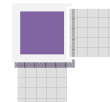
olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta memasyarakatkan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkuaitas.

Serta mewujudkan olahragawan yang berprestasi dan kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

1. Untuk mewujudkan visi dan misi di atas Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan lima tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan (2015 - 2019) :
2. Mengembangkan pemuda yang memiliki katakter dan kemandirian
3. Memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
4. Meningkatkan sinergi lintas sector dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
5. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
6. Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (2015 - 2019) di bidang kepemudaan dan keolahragaan :

1. Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan



profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, melalui:

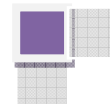
2. Bela negara;
3. Kompetisi dan apresiasi pemuda;
4. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
5. Pemberian kesempatan yang sama untuk berkekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
7. Pendampingan pemuda;
8. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
9. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:

1. Peningkatan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha/Swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;
3. Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.

Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui:

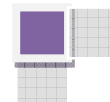
1. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;



2. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
3. Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
4. Pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;
5. Pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
6. Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;
7. Peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan
  - ✓ Meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan
  - ✓ Meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional;
2. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang ditandai dengan:
  - ✓ Meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan;
  - ✓ Meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan; dan (3) penobatan para role model pemuda Indonesia;
3. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan:



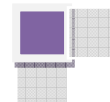
- ✓ Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;
  - ✓ posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017 dan 2019; dan
  - ✓ meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016;
4. Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan:
- ✓ Pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
  - ✓ Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games 2018.

## 2. Telaah Renstra untuk Pariwisata

### 2.a. Telaah Renstra Dinas Pariwisata Provinsi

Visi Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, menggunakan pijakan Visi Gubernur Provinsi Jambi periode 2016-2021, yaitu: “ TERWUJUDNYA JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA (JAMBI TUNTAS)”

Berdasarkan visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi periode 2016 - 2021 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 6 agenda prioritas Pemerintah Provinsi Jambi yang disebut JAMBI TUNTAS. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah



Provinsi Jambi 2016 - 2021 yang terkait dengan Kebudayaan dan Pariwisata, adalah agenda prioritas butir ke kedua, ke empat, ke lima, dan keenam, visi pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yakni:

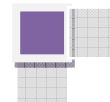
“Terwujudnya Jambi sebagai daerah tujuan wisata yang unggul berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kekayaan alam dan budaya menuju Jambi TUNTAS Tahun 2021” ,

Dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata yang unggul, berdaya saing, Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, mengandung arti :

- a. Pariwisata Jambi dapat menjadi lokomotif perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan menuju tertib, unggul, nyaman, adil dan sejahtera (TUNTAS).
- b. Jambi menjadi tujuan wisata dalam skala regional, nasional, dan internasional yang berbasis pada peningkatan kualitas dalam perspektif kepariwisataan.
- c. Mempertahankan budaya lokal yang multikultur menjadi bagian dari semua aspek kehidupan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Untuk dapat mewujudkan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tersebut, disusunlah enam misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016 -2021 yang terarah dan terpadu, misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yaitu:

- a. Misi 1; Mewujudkan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif melalui upaya peningkatan kualitas destinasi pariwisata.



- b. Misi 2; Meningkatkan keterlibatan stakeholder (kemitraan) dalam pengembangan kepariwisataan daerah menjadi produk pariwisata yang berkualitas.
- c. Misi 3; Meningkatkan aktifitas pemasaran pariwisata yang efektif, selektif dan berdaya saing global.
- d. Misi 4; Meningkatkan pengelolaan Kekayaan budaya sebagai upaya peningkatan apresiasi masyarakat daerah, nasional dan internasional.
- e. Misi 5; Mewujudkan Pengembangan dan pemanfaatan keragaman budaya daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Misi 6; Meningkatkan perlindungan dan pelestarian budaya sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya daerah.

## **2.b. Telaah Renstra Kementerian Pariwisata**

Dalam dokumen Renstra tersebut dinyatakan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 sebagai berikut :

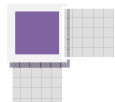
### **1. VISI**

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

### **2. MISI**

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industry, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;

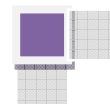


- b. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- c. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- d. Mengembangkan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

### 3. TUJUAN

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;
- b. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
- c. Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif
- d. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri





pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

#### 4. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya investasi disektor pariwisata
3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata
10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Tabel 3.2

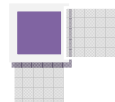
#### Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan K/L

No.	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra OPD	Sasaran Pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra OPDK/L
<b>BIDANG PARIWISATA</b>				
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatnya pemasaran pariwisata yang	Meningkatnya investasi di sektor

			efektif, selektif dan berdaya saing global	pariwisata
2. Persentase peningkatan destinasi wisata	Berkembangnya Destinasi Wisata Daerah	Meningkatnya kualitas destinasi wisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
<b>BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
1. Persentase Pemuda Wirausaha dan Pelopor yang Mandiri	Meningkatnya partisipasi dan peran pemuda	Terwujudnya Pemuda yang Berkarakter, Berprestasi, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan	
2. Prestasi pekan Olahraga pelajar / Taruna Daerah	Meningkatnya prestasi daerah di bidang olahraga		Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional	

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan bahwa RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:



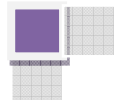
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

#### **3.4.1 Posisi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Lingkup Perpres No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatra**

Berdasarkan kepada perpres No 13 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatra terdapat beberapa kawasan prioritas pembangunan pariwisata dengan tema-tema pembangunan berdasarkan kepada karakteristik wilayah masing-masing. Secara umum terdapat beberapa kawasan prioritas pembangunan dalam lingkup provinsi jambi yang telah ditentukan dalam Perpres no 13 tahun 2012, salah satunya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masuk kedalam strategi operasional perwujudan kawasan peruntukan pariwisata.

Beberapa strategi operasional perwujudan kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri dari :

- a. Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang di dukung prasarana dan sarana pariwisata;



- b. Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- c. Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang di lakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata; dan
- d. Mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata.

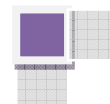
Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat **Taman Nasional Bukit Tiga Puluh** yang termasuk kedalam taman nasional dan **Cagar Alam Sungai Betara**.

Dalam konteks tersebut maka dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan pembangunan sektor pariwisata yang diharapkan dapat menjadikan sektor unggulan dalam pembangunan daerah.

#### **3.4.2 Posisi Kepariwisataan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Perda No 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Garis Besar termasuk dalam pusat Kegiatan Wilayah Lokal (PKL) dan masuk dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) V.

Indikasi arahan peraturan zona kawasan pariwisata yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi yang berkaitan dengan rencana pengembangan pariwisata provinsi Jambi, sebagai berikut:



- a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenalkan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. Dalam kawasan pariwisata diperkenalkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDL (Analisis Dampak Lingkungan).

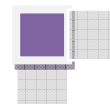
RTRW provinsi jambi juga telah mengatur penggunaan kawasan lindung yang dapat digunakan sebagai kawasan wisata, hal ini merupakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membangun dan mengembangkan pariwisata dikawasan lindung, seperti kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang dimiliki oleh Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam RTRW-nya juga telah menetapkan kawasan budidaya, yang salah satunya adalah kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri atas:

Tabel 3.3

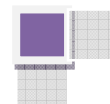
## Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi Jambi

NO.	ALAM	BUDAYA	BUATAN
1.	Taman nasional berbak	Kawasan wisata candi Muaro	Lanmar Menara Jam Besak Gental Arasyi



		Jambi	
2.	Taman Nasional Berbak	Kawasan wisata candi muaro Jambi	Landmark Menara Jam Besak Gentala Arasyi
3.	Taman Nasional Kerinci Seblat	Kawasan cagar budaya seberang	Jembatan pedestrian sungai batanghari
4.	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Kawasan cagar budaya rumah tuo	Landmark Danau Sipin
5.	Taman nasional bukit dua belas	Kawasan cagar budaya	Museum perjuangan
6.	Taman hutan raya senami dan sekitar tanjung	Situs lubuk ruso	Kebun binatang taman rimba
7.	Kawasan wisata geopark	Makam Sultan Thaha	
8.	Danau kerinci dan danau gunung tujuh	Makam rangkayo pingai dan makam rangkayo hitam	
9.	Danau depati		
10.	Gunung kerinci		
11.	Air terjun telun		
12.	Grao dan wisata teluk wang		
13.	Danau sipin		

Sumber: RTRW Provinsi Jambi 2013-2033



### 3.4.3 Posisi Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033

Perumusan rencana pola ruang wilayah kabupaten tanjung jabung barat dilakukan dengan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan oleh RTRW Nasional, RTRW pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Jambi. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka pola ruang wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

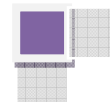
Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia

Dalam kawasan lindung terdapat beberapa peruntukan kawasan, salah satunya yaitu kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Kawasan ini terdiri dari kawasan taman nasional Bukit Tiga Puluh, dan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur.

#### a. Taman Nasional

Taman Nasional yang berada di kabupaten Tanjung Jabung Barat Berupa Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh dengan Luas Kurang Lebih 11.520 (Sebelas ribu lima ratus dua puluh) hektar. Hutan Taman Nasional Tiga Puluh yang juga berfungsi sebagai pelindung daerah imbuhan air tanah



dalam khususnya untuk wilayah perkantoran kuala tungkal agar dilestarikan vegetasinya.

Taman nasional bukit tiga puluh merupakan hutan hujan tropis dataran rendah yang mempunyai nilai konservasi luar biasa dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karna didalam nya terdapat 246 jenis tumbuhan obat tradisional, 51 jenis tumbuhan obat dan 8 jenis cendawan obat serta flora endemik seperti cendawan muko rimau (*Rafflesia hasseltii*), salo (*Johannesteijsmannia altifrons*) dan bunga bangkai (*Amorphophallus titanum*). TNBT juga tempat bernaungnya 42 jenis mamalia, 7 jenis primata, 11 jenis tupai, 193 jenis burung yang merupakan sepertiga jenis burung di sumatra, 134 jenis kupu-kupu dan 97 jenis ikan dari 25 suku dan 52 marga.

**b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya**

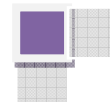
Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya di kabupaten tanjung jabung barat meliputi :

- 1) Sungai dualap dengan luas kurang lebih 100 hektar di kecamatan kuala betara;
- 2) Kawasan konservasi kerang darah dengan luas kurang lebih 365,3 Ha di kecamatan seberang kota; dan
- 3) Suaka perikanan perairan umum sungai pematang lumut di kecamatan betara.
- 4)

**c. Cagar Alam**

Cagar alam berhutan bakau berupa hutan mangrov di kabupaten tanjung jabung barat terdapat di kuala betara dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar.

Usaha yang dilakukan terhadap kawasan pantai berhutan bakau yaitu melestarikan keberadaan hutau bakau sebagai





pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya.

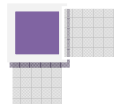
d. Taman Wisata Alam

Potensi Pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebar di beberapa kecamatan. Obyek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- 1) Air terjun gemuruh tiga puluh di Kecamatan batang asam;
- 2) Air terjun bukit pinang bawah tiga puluh di Kecamatan Batang Asam;
- 3) Air terjun suban di Kecamatan Batang Asam;
- 4) Arum jeram sei. Tantang di Kecamatan Batang Asam;
- 5) Air terjun pelangi di Kecamatan Tungkal Ulu;
- 6) Air terjun danau payo lebar di Kecamatan Renah Mandaluh;
- 7) Air terjun lanparin di Kecamatan Renah Mandaluh;
- 8) Air terjun langpinai di Kecamatan Renah Mandaluh;
- 9) Hutan lindung gambut;
- 10) Kawasan lindung pantai mangrove dan cagar alam pantai Timur;
- 11) Kawasan pangkal babu; dan
- 12) Kawasan wisata bahari di Kecamatan Tungkal Ilir.

Dengan menggunakan telaah RTRWK dapat diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- 1) Letak lokasi potensi potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kebanyakan berada jauh dari pusat kota, dan berada dikecamatan - kecamatan yang masih sulit di akses pengunjung baik dengan berjalan kaki atau berkendara



- 2) Permasalahan pertama memberikan dampak pada sulitnya pengembangan potensi yang ada menjadi sebuah objek wisata yang siap untuk disajikan secara pantas untuk dikunjungi dan dinikmati. Kesulitan tersebut khususnya dari segi penyediaan anggaran yang dibutuhkan yang tentunya memakan banyak biaya.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat

Analisa isu-isu strategis DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan pertimbangan perkembangan yang terjadi pada DISPARPORA pada khususnya dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pola SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, and Treat*) yang telah dijelas pada Bab II poin 2.4 Tentang Tantangan dan Peluang OPD, dapat diidentifikasi isu-isu strategis Disporaudpar Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Isu-isu Strategis DISPARPORA Kab. Tanjab Barat**

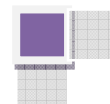
No	ASPEK	ISU STRATEGIS
1	Sumber Daya Manusia	1) Masih kurangnya jumlah SDM khususnya di jajaran Staf fungsional umum 2) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. 3) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai sistem pendataan yang baik dan rapi 4) Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sistematis dan akurat
2	Pariwisata	1) Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata

		2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan serta menjaga dan memelihara tempat tempat wisata yang ada
3	Pemuda	1) Kurangnya minat dan kesadaran pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan 2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemuda untuk berusaha dan berwiswasta
4	Olahraga	1) Kurangnya upaya pengembangan budaya olahraga, baik di kalangan pemuda maupun masyarakat luas. 2) Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga

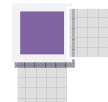
Tabel 3.5

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

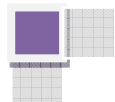
Aspek	Capaian / Kondisi Saat Ini	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Internal	Eksternal	
Sumber Daya Manusia	1) Masih kurangnya jumlah SDM khususnya di jajaran Staf fungsional umum	Permohonan penambahan staf	Distribusi penerimaan CPNS	-Sering terhambat dan terlambatnya penyelesaian pekerjaan
	2) Masih kurang dan terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.	Pengiriman Staf untuk mengikuti pelatihan dan kursus	Keterbatasan anggaran Bintek	-Kurangnya pengetahuan dan wawasan pegawai
	3) Masih lemahnya sistem pengarsipan dan administrasi dalam mencapai	Perlu ketegasan pimpinan dalam aturan pengarsipan	-	-Kurang rapinya administrasi dan pengarsipan



		sistem pendataan yang baik dan rapi			dokumen
	4)	Belum optimalnya pengelolaan data base DISPARPORA yang tersusun secara sistematis dan akurat	Penataan dan pendataan yang lebih akurat dan tersusun	Kurangnya kerjasama pihak perusahaan /Hotel dll dlm menyerahkan data	-Kesulitan dalam mendapatkan data
<b>Pariwisata</b>	1)	Banyaknya potensi pariwisata yang tidak sebanding dengan pelaksanaan pengembangannya menjadi objek wisata	Kurangnya pergerakan dalam usaha mengembangkan potensi yang ada	Kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah	
	2)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan serta menjaga dan memelihara tempat wisata yang ada	Kurang tegasnya regulasi menyangkut hukuman kepada para pelanggar	Kurang tegasnya regulasi menyangkut hukuman kepada para pelanggar	
<b>Kepemudaan</b>	1)	Kurangnya minat dan kesadaran pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan	Kurangnya wadah yang diberikan untuk pemuda bereksperi	Kurangnya dukungan pemerintah dalam penganggaran	Tidak optimalnya kegiatan kepemudaan
	2)	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemuda untuk berusaha dan berwiswasta	Kurangnya dukungan kegiatan dalam melatih kewirausahaan pemuda	Kurangnya dukungan pemerintah dalam penganggaran	
<b>Keolahragaan</b>	1)	Kurangnya upaya	Kurangnya kegiatan yang dapat	Kurangnya dukungan	Kurangnya kegiatan



	<p>pengembangan budaya olahraga, baik di kalangan pemuda maupun masyarakat luas.</p> <p>2) Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi kegiatan keolahragaan. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana olahraga</p>	<p>mengcover serta mendukung keolahragaan</p> <p>Pengusulan kesediaan sarana dan prasarana</p>	<p>pemerintah dalam penganggaran</p> <p>Kurangnya dukungan pemerintah dalam penganggaran</p>	<p>keolahragaan</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan olahraga</p>
--	---	--	--	---



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DISPARPORA Kab. Tanjab Barat

##### I. Tujuan

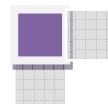
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan harus disusun dengan baik guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berikut adalah tujuan tujuan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga telah ditetapkan:

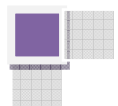
- 1) **TUJUAN 1** : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pariwisata daerah yang dikenal tidak hanya di dalam daerah namun juga di kancah nasional bahkan internasional.
- 2) **TUJUAN 2** : Terwujudnya Pemuda yang memiliki profesionalisme dan berprestasi yang dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- 3) **TUJUAN 3** : Berkembangnya Olahraga daerah yang memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

##### II. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan

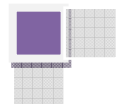


melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut :



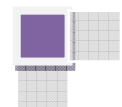
**Tabel 4.1 (T-C 25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan**  
**Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)	Ket
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pariwisata daerah yang dikenal tidak hanya didalam daerah namun juga dikancah nasional dan internasional	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Daerah	Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	-	-	-	10%	15%	15%	40%	
		Berkembangnya Destinasi Wisata Daerah	Persentase peningkatan Destinasi Wisata	%	-	-	-	20%	25%	30%	75%	
2	Terwujudnya pemuda yang memiliki profesionalisme dan berprestasi yang dapat	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Pemuda	Persentase Pemuda Wirausaha dan Pelopor yang mandiri	%	-	-	-	10%	10%	20%	40%	





	berperan aktif dalam pembangunan											
3	Berkembangnya olahraga daerah yang memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap sehingga mampu bersaing dikancah nasional dan internasional	Meningkatnya prestasi daerah di bidang olahraga	Prestasi pekan olahraga pelajar / taruna daerah	prestasi	-	-	-	15%	20%	20%	55%	



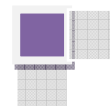
## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan. Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai kegiatan.

Berikut adalah Strategi dan Kebijakan DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat:

1. Strategi :  
Mengupayakan Optimalisasi serta efektifitas pelaksanaan kegiatan  
Kebijakan :
  - a. Mengoptimalkan kinerja SDM dengan memberikan dukungan maksimal terhadap aktifitas dan fasilitas pelaksanaan kegiatan
  - b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM
2. Strategi :  
Mengembangkan pariwisata daerah agar dapat menjadi daerah destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah  
Kebijakan :
  - a. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kepariwisataan. Khususnya dalam pengembangan potensi-potensi wisata menjadi sebuah objek destinasi wisata
  - b. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kepariwisataan, Khususnya dalam hal promosi kepariwisataan daerah



3. Strategi :

Peningkatan profesionalisme Pemuda dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan

Kebijakan :

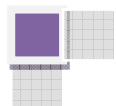
- a. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan memberikan wadah dan fasilitas bagi organisasi kepemudaan

4. Strategi :

Mengembangkan budaya Olahraga di kalangan masyarakat serta meningkatkan prestasi Olahraga daerah

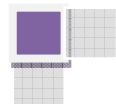
Kebijakan :

- a. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan kesadaran dan prestasi Olahraga daerah
- b. Optimalisasi fasilitasi sarana dan prasarana olahraga



Tabel 5.1 (T-C. 26)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas</b>			
<b>MISI I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Ekonomi yang Berkualitas</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<u>Tujuan 1</u> Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	<u>Sasaran 1.4</u> Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Mengembangkan budaya Olahraga di kalangan masyarakat serta meningkatkan prestasi Olahraga daerah	Optimalisasi fasilitasi sarana dan prasarana olahraga
<b>MISI III: Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Agroindustri dan Perikanan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<u>Tujuan 2</u> Meningkatnya Daya Saing Agroindustri Perikanan Melalui Ekonomi Kerakyatan	<u>Sasaran 3.8</u> Berkembangnya Potensi Wisata agar menjadi Objek Wisata	Mengembangkan pariwisata daerah agar dapat menjadi daerah destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah	Optimalisasi kegiatan -kegiatan yang mendukung pengembangan kepariwisataan. Khususnya dalam pengembangan potensi-potensi wisata menjadi sebuah objek destinasi wisata



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

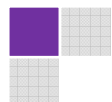
Sebagai upaya dalam mencapai visi dan misi DISPARPORA Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dengan berdasarkan pada strategi dan kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh rencana program dan kegiatan pada DISPARPORA Kab. Tanjab Barat sebagai berikut:

### **Program-Program :**

- 1) Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 7) Pengembangan Pemasaran Wisata
- 8) Pengembangan Kemitraan
- 9) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 10) Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga
- 11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

### **Kegiatan-kegiatan:**

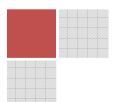
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Iklan Layanan
10. Penyediaan Makan dan Minuman
11. Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah
12. Pembangunan Gedung Kantor
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
21. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
22. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
24. Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan
25. Pengembangan Potensi Wisata dalam Kab. Tanjab Barat
26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
27. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
28. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis
29. Pelaksanaan Haul Syek Abdul Qadir Al-Jaelani
30. Pengembangan Potensi Wisata di Kab. Tanjab Barat
31. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
32. Pertunjukan dan Hiburan Umum
33. Pengembangan Atraksi Wisata
33. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemiteraan

34. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
35. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
36. Seleksi TC dan Pengiriman Paskibraka ke Provinsi dan Tour
37. Napak Tilas Jejak Pahlawan
38. Peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
39. Pembinaan dan pengembangan KWP
40. Pemilihan Pemuda Pelopor
41. Peringatan Hari Sumpah Pemuda
42. Kegiatan KNPI Kab.Tanjung Jabung Barat
43. Kegiatan Pramuka Kab.Tanjung Jabung Barat
44. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah(KONI)
45. Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat (PEPARPROV)
46. Pelaksanaan Lomba Lari 10 K
47. Pembinaan Olahraga Rekreasi
48. Seleksi Olah Raga Tradisional
49. Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
50. Pertandingan Olah Raga Bupati Cup
51. Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
52. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
53. Gubernur Cup dan TC Gubernur Cup
54. Mengikuti Piala Menpora
55. Pelaksanaan Peringatan Hari Olahraga Nasional(HAORNAS)
56. Pengadaan Peralatan Olahraga
57. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
58. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.

**TABEL 6.1 ( T-C. 27)**





## BAB VII

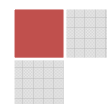
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dokumen RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kab. Tanjung Jabung Barat harus diarahkan untuk mengacu pada tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam dokumen RPJMD Kab. Tanjab Barat tersebut.

Berikut adalah sinergitas antara indikator kinerja Disparpora Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat periode 2016-2021:

**Tabel 7.1 (T-C. 28)**  
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	-	-	-	-	10%	15%	15%	40%
2	Persentase peningkatan destinasi wisata	-	-	-	-	20%	25%	30%	75%
3	Prestasi pekan olahraga pelajar / taruna daerah	-	-	-	-	15%	20%	20%	55%



## BAB VII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan olahraga dan pariwisata dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, keterampilan, kemandirian, kesehatan, prestasi dan upaya daya saing yang dilandasi iman dan taqwa.

Kebijakan dan program Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan strategi dan upaya untuk mewujudkan Visi, Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Selain itu, rencana program yang dituangkan dalam langkah ini masih bersifat Indikatif, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional kedalam perencanaan kerja tahunan.

Akhirnya dengan rumusannya Rencana Strategi ini, semua kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharap mengacu pada Renstra ini, dimana setiap awal tahun dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan) dan pada akhir tahun dilaporkan dalam Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

Mei 2019

Kepala Dinas  
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
Kab. Tanjung Jabung Barat



OCTOPRIADI  
NIP. 19831013198803001